

BAB I

PENDAHULUAN

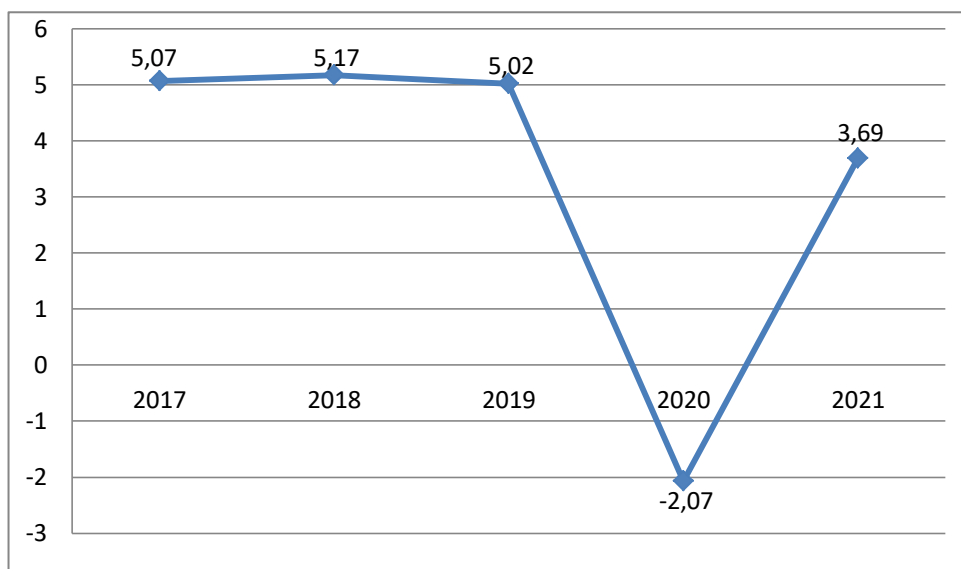
1.1 Latar Belakang Penelitian

Pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan output total dalam jangka panjang tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih kecil atau lebih besar dari jumlah pertumbuhan penduduk yang diikuti oleh perubahan struktur perekonomian atau tidak (Afandi, 2014). Sudah sekian lama, perhatian utama masyarakat perekonomian dunia tertuju pada cara-cara untuk mempercepat tingkat pertumbuhan pendapatan nasional. Para ekonomi dan politisi dari semua negara, baik negara-negara kaya maupun negara miskin, yang menganut sistem kapitalis, sosial maupun campuran, semuanya sangat mendambakan dan menomorsatukan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*).

Masalah pertumbuhan ekonomi harus menjadi perhatian karena pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat (Oka Artana Yasa dan Sudarsana, 2015). Pertumbuhan ekonomi yang baik dapat memperbaiki indeks pembangunan manusia, karena pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia (Ayu Krisna Dewi dan Sutrisna, 2014). Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan produksi barang dan jasa di suatu Negara, seperti pertambahan dan jumlah produksi barang industri, perkembangan infrastruktur, pertambahan jumlah sekolah, pertambahan produksi sektor jasa dan pertambahan produksi barang modal. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah satu indikator

keberhasilan pembangunan. Dengan demikian makin tingginya pertumbuhan ekonomi makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat (Sukirno, 2011:423).

Pertumbuhan berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang masalah makro ekonomi dalam jangka panjang. Dari suatu periode ke periode lainnya kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. Kemampuan yang meningkat ini disebabkan karena faktor-faktor produksi akan selalu mengalami pertambahan dalam jumlah dan kualitasnya. Berikut merupakan gambaran pertumbuhan ekonomi Indonesia selama tahun 2017-2021 tersaji dalam sebuah Gambar 1.1 dibawah ini:



Gambar 1.1
Data Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2017-2021 (%)
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami fluktuasi yang cenderung menurun dari tahun 2017 sampai tahun

2021. Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kenaikan dari 5,07% pada tahun 2017 menjadi 5,17% pada tahun 2018. Pada tahun 2018, laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,17% kemudian pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 5,02%. Namun pada tahun 2020 laju pertumbuhan ekonomi Indonesia kembali mengalami penurunan yang cukup drastis menjadi -2,07%. Hal ini disebabkan karena dunia digemparkan oleh kejadian yang diduga sebuah kasus pneumonia atau disebut *coronavirus disease* (COVID-19). Hal ini tentu menyebabkan pemerintah melakukan beberapa kebijakan karena fokusnya terbagi antara ekonomi dan kesehatan. Dan di tahun 2021 laju pertumbuhan Ekonomi Indonesia Kembali tumbuh sebesar 3,69%, hal ini dikarenakan dalam bidang kesehatan, penguatan strategi pengendalian pandemi COVID-19 terus dilakukan. Akselerasi vaksinasi melalui pemberian dosis vaksin ketiga (booster) terus ditingkatkan, sehingga akan menambah kepercayaan masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi.

Untuk melihat penyebab menurunnya laju pertumbuhan ekonomi juga bisa dilihat dari kegiatan ekspor di Indonesia. Ekspor merupakan salah satu sumber devisa yang sangat dibutuhkan oleh negara atau daerah perekonomian yang bersifat terbuka seperti di Indonesia, karena ekspor secara luas ke berbagai negara yang memungkinkan peningkatan jumlah produksi yang mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga dapat diharapkan dapat menstabilkan ataupun memberikan andil yang besar terhadap pertumbuhan perekonomiannya. seperti yang telah dijelaskan dalam teori Hecksher-Ohlin bahwa suatu negara akan mengekspor produknya yang produksinya menggunakan faktor produksi yang murah dan

berlimpah secara intensif. Kegiatan ini akan meningkatkan pendapatan nasional dan mempercepat proses pembangunan juga pertumbuhan ekonomi, sehingga tentu menguntungkan negara tersebut (Pridayanti, 2014).



Gambar 1.2
Data Ekspor Indonesia Tahun 2017-2021 (Juta USD)

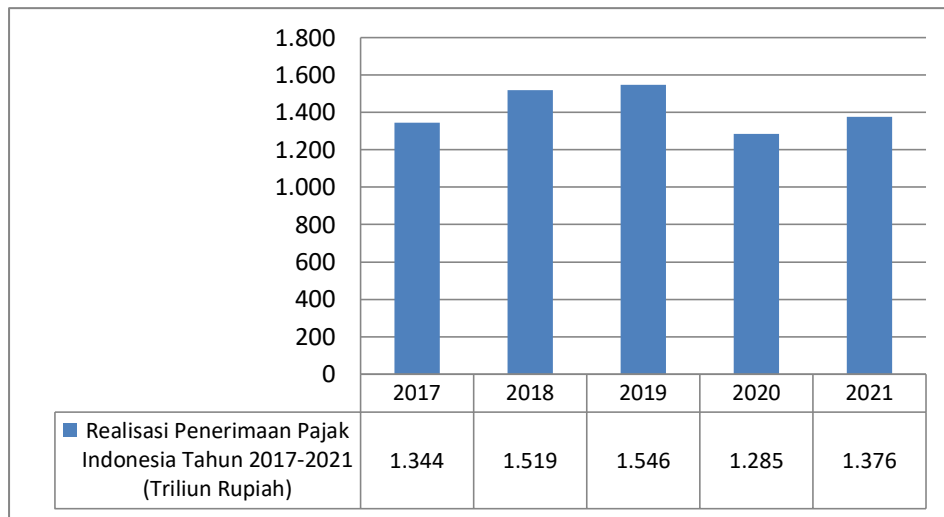
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah.

Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwasannya nilai ekspor dari tahun 2017 sampai 2021 mengalami fluktuasi yang tidak signifikan, dimana pada tahun 2020 ekspor mengalami penurunan dengan jumlah 163.192 juta USD, hal ini disebabkan karena oleh pandemi virus corona (COVID-19). Tidak sedikit negara yang menerapkan kebijakan-kebijakan baru sebagai upaya untuk menangani krisis di pandemi ini. Salah satu kebijakan yang saat ini diterapkan oleh banyak negara adalah *Non-Tariff Measures* atau hambatan non tarif berupa pembatasan ekspor atau *export restriction*. Menurut laporan WTO, terdapat sekitar 80 negara telah menerapkan kebijakan pembatasan ekspor atas perlengkapan medis termasuk vaksin, obat-obatan, dan peralatan medis.

Penerapan kebijakan pembatasan ekspor diberlakukan oleh berbagai negara sebagai bentuk pencegahan terhadap kelangkaan barang-barang kebutuhan pokok terkait dengan peningkatan permintaan pada masa pandemi. Namun alih-alih menerapkan kebijakan sebagai bentuk penanganan krisis pandemi COVID-19 pembatasan ekspor justru secara signifikan berpotensi untuk menghambat pemulihan ekonomi dunia serta menghambat dunia untuk lepas dari krisis pandemi COVID-19. Dan di tahun 2021 ekspor kembali menguat bahkan mencapai titik tertinggi yaitu sebesar 231.610 juta USD, hal ini tentu membuktikan bahwa Negara Indonesia bisa bangkit dengan pesat dan penanganan yang tepat atas krisis pandemi yang terjadi.

Pajak merupakan faktor yang amat penting sebagai penerimaan negara yang pokok dalam menopang pembiayaan bagi pembangunan, selain penerimaan non-pajak seperti migas serta non-migas. Sumber APBN kira-kira 75% dipenuhi dari pajak, jadi bisa dikatakan pajak sebagai penerimaan pemerintah yang paling signifikan untuk memenuhi APBN. Penerimaan pajak yang tinggi bisa memacu negara tertentu meningkatkan pengeluaran belanja-belanja pemerintah, sehingga bisa memacu perekonomian yang berujung bagi terciptanya peningkatan pertumbuhan ekonomi. Mengoptimalkan penerimaan pajak amat diperlukan terkait dengan bertambahnya keperluan dana belanja rutin dan modal bagi pemerintah. Pajak untuk pemerintah bukan hanya sumber pendapatan, selain itu juga sebagai salah satu sarana kebijakan pemerintah untuk mengatur roda perekonomian. Berikut merupakan gambaran realisasi penerimaan pajak di

Indonesia selama tahun 2017- 2021 tersaji dalam sebuah Gambar 1.3 dibawah ini:



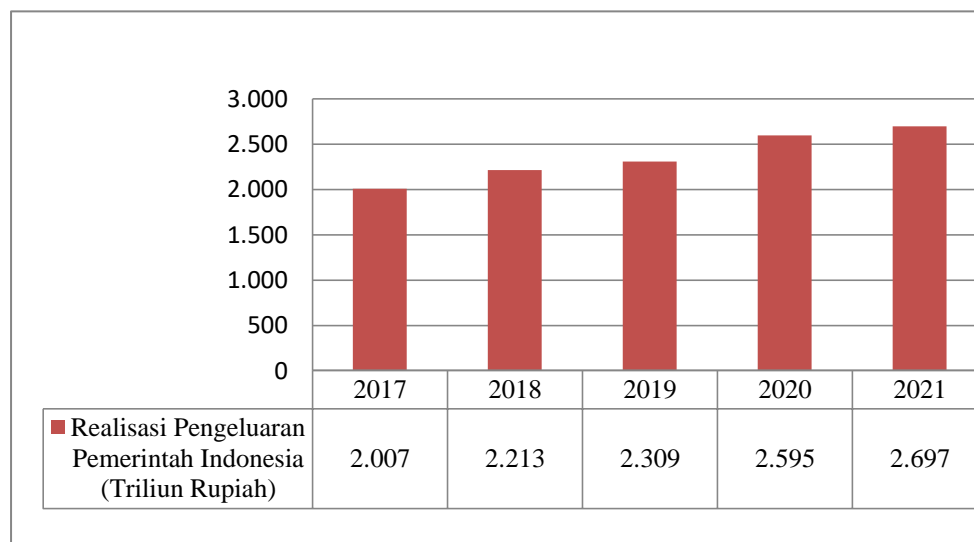
Gambar 1.3
Data Realisasi Penerimaan Pajak Indonesia Tahun 2017-2021
(Triliun Rupiah)

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah.

Dari gambar 1.3 dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak mengalami fluktuasi cenderung meningkat dari tahun 2017 sampai tahun 2021. Pada tahun 2017 penerimaan pajak Indonesia adalah sebesar 1.344 triliun rupiah sampai pada tahun 2019 yaitu sebesar 1.546 triliun rupiah. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan dikarenakan Pandemi COVID-19 yang menyebabkan penurunan ekonomi sehingga pemerintah mengencangkan insentif kepada seluruh dunia usaha yang membuat penerimaan pajak tahun 2020 tidak tercapai. Di samping itu keterbatasan dalam pelaksanaan eskensifikasi dan intensifikasi juga merupakan elemen yang membuat kekurangan muncul. Dan Pada tahun 2021 penerimaan pajak Indonesia kembali meningkat sebesar 1.376 trilun rupiah. Hal ini karena kerja keras dari Direktorat Jendral Pajak yang dapat mempertahankan prinsip agar penerimaan pajak selalu mencapai target. Selain itu

pemerintah selalu menjaga kesinambungan fiskal diantara dengan melakukan penyesuaian tarif dan perluasan basis pajak, peningkatan pelayanan terhadap wajib pajak, dan perbaikan sistem administrasi perpajakan.

Pengeluaran Pemerintah merupakan bagian dari kebijakan fiskal yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, yang tercermin dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk nasional dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah atau regional. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output, maupun kesempatan kerja dan memacu atau mendorong pertumbuhan ekonomi. Berikut merupakan gambaran realisasi pengeluaran pemerintah di Indonesia selama tahun 2017- 2021 tersaji dalam sebuah Gambar 1.4 dibawah ini:



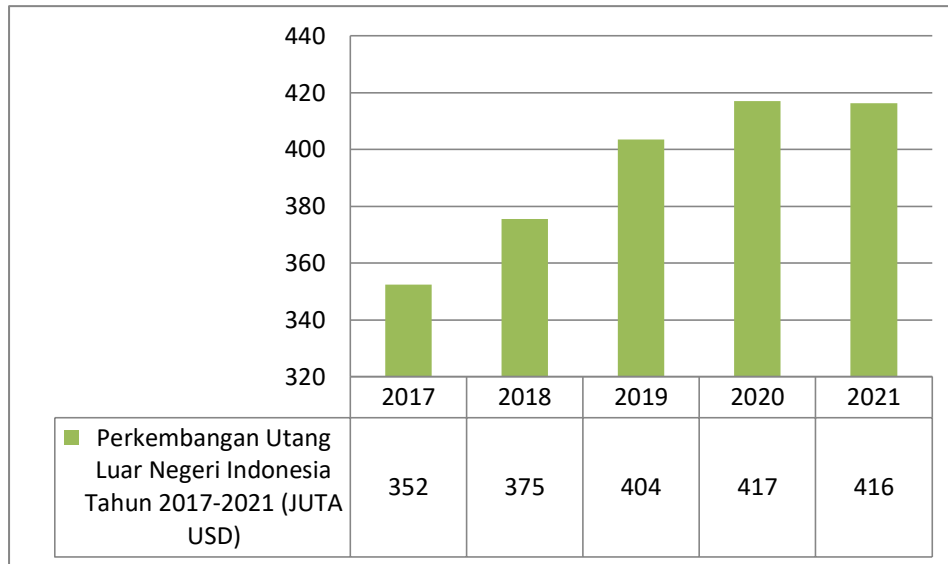
Gambar 1.4
Data Realisasi Pengeluaran Pemerintah Indonesia Tahun 2017-2021
(Triliun Rupiah)

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah.

Berdasarkan tabel 1.4 diatas merupakan realisasi pengeluaran pemerintah Indonesia selama 5 tahun terakhir yang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2017 total realisasi pengeluaran pemerintah Indonesia sebesar 2.007 Triliun Rupiah. Di tahun 2018 realisasi pengeluaran pemerintah Indonesia mengalami kenaikan sebesar 2.213 triliun rupiah, begitu pula pada tahun-tahun selanjutnya realisasi pengeluaran pemerintah Indonesia terus mengalami peningkatan di tahun 2019, 2020, dan 2021. Dimana pada tahun 2019 realisasi pengeluaran pemerintah Indonesia sebesar 2.309 triliun rupiah, di tahun 2020 realisasi pengeluaran pemerintah Indonesia menunjukkan angka sebesar 2.595 triliun rupiah, dan di tahun 2021 realisasi pengeluaran pemerintah Indonesia mencapai 2.697 triliun rupiah. Dari peningkatan tiap tahunnya tentu bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia dalam hal Pelayanan umum, Pertahanan, Ketertiban dan ketentraman, Ekonomi, Lingkungan hidup, Fasilitas umum, Pariwisata dan budaya, Perlindungan sosial, Pertanian, Infrastruktur, Kesehatan dan Pendidikan.

Selain itu, faktor lainnya yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia adalah utang luar negeri. Pinjaman luar negeri adalah setiap pembiayaan melalui utang yang diperoleh pemerintah dari pemberi pinjaman luar negeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga negara, yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu. Negara menggunakan utang luar negeri untuk membiayai pembangunan dikarenakan keterbatasan tabungan domestik. Berikut merupakan gambaran

perkembangan utang luar negeri Indonesia selama tahun 2017- 2021 tersaji dalam sebuah Gambar 1.5 dibawah ini:



Gambar 1.5
Perkembangan Utang Luar Negeri Tahun 2017-2021 (Juta USD)

Sumber: Bank Indonesia, diolah.

Gambar 1.5 menunjukkan bahwa tren utang luar negeri Indonesia dalam 5 tahun terakhir terus meningkat. Pada tahun 2017 mencapai 352 juta USD, dan terus mengalami kenaikan sehingga mencapai angka 416 juta USD pada tahun 2021. Kenaikan utang luar negeri ini dipicu oleh beberapa hal seperti pembangunan nasional, penutupan defisit, dan berbagai kebutuhan lainnya. Adapun pembengkakan utang ini tentu dilakukan pemerintah dengan harapan investasi jangka panjang pembangunan mampu meningkatkan ekonomi nasional.

Pembangunan sebuah negara tentu membutuhkan dana yang sangat besar sekali demi mencapai pertumbuhan investasi. Maka dari itu saat pendapatan tidak mencukupi, maka pemerintah harus mencari dana tambahan seperti dari utang, akan tetapi utang ini hanya berfungsi sebagai dana pelengkap bagi pembangunan bukan sumber dana utama.

Dari uraian tersebut menunjukkan bahwa faktor-faktor penting seperti ekspor, pendapatan pajak, pengeluaran pemerintah dan utang luar negeri mempengaruhi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Faktor penting tersebut mempunyai angka yang fluktuatif, selain itu ada beberapa variabel yang mengalami peningkatan, dan ada juga yang mengalami penurunan yang cukup signifikan pada akhir tahun 2020 karena adanya pandemi. COVID-19 juga mempengaruhi makro dan mikro ekonomi yang dimana, pendapatan dari pajak tetap menjadi andalan utama untuk menopang pembiayaan APBN, juga utang luar negeri Indonesia bertambah besar karena kebijakan yang diambil pemerintah memerlukan anggaran sehingga pengeluaran pemerintah mengalami peningkatan, bahkan kegiatan ekspor terhambat sehingga tidak bisa membantu banyak untuk pembiayaan APBN, sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia terdampak dan sedikit terhambat yang mengalami angka minus.

Dari fenomena di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Pengaruh Ekspor, Pendapatan Pajak, Pengeluaran Pemerintah, dan Utang Luar Negeri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia tahun 2005-2021”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan yang di hadapi sebagai berikut.

1. Bagaimana pengaruh ekspor, pendapatan pajak, pengeluaran pemerintah, dan utang luar negeri secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2005-2021?

2. Bagaimana pengaruh ekspor, pendapatan pajak, pengeluaran pemerintah, dan utang luar negeri secara bersama – sama terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2005-2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka tujuan yang ingin dihasilkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh ekspor, pendapatan pajak, pengeluaran pemerintah, dan utang luar negeri secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2005-2021.
2. Bagaimana pengaruh ekspor, pendapatan pajak, pengeluaran pemerintah, dan utang luar negeri secara bersama – sama terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2005-2021.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah dan tujuan penelitian, manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Penulis

Sebagai sarana penambah wawasan dan pemahaman lebih mendalam khususnya tentang ekspor, pendapatan pajak, pengeluaran pemerintah, dan utang luar negeri terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2005-2021.

2. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur dan referensi bagi lingkungan *civitas academica* khususnya pada Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi.

3. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan dijadikan bahan sekaligus rekomendasi mengenai pengaruh variabel di atas khususnya kebijakan dalam membangun perekonomian Indonesia.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, memberikan informasi dan masukan atau rujukan untuk peneliti selanjutnya agar hasil penelitian menjadi lebih baik lagi.

1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Indonesia. Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan data sekunder yang setiap variabelnya diperoleh dari *website* resmi Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, *World Bank*, Publikasi laporan Penerimaan Pajak dan sumber lain yang relevan dengan kajian penelitian.

1.5.2 Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilakukan sejak diterbitkannya surat keputusan tentang pembimbing skripsi/tugas akhir yang diawali dengan pengajuan judul pada

